

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengkaji tentang landasan dan definisi moralitas sosial secara umum. Bagian awal bab ini mengkaji teori-teori moral dari berbagai pandangan, setelah itu peneliti mengerucutkan urgensi moral ini kedalam ranah Al-Qur'an, sehingga menyinggung pemahaman moral sosial dalam Al-Qur'an yang nantinya akan dianalisis.

Bagian kedua penelitian pada bab ini membahas konsep moral digital seperti karakter, sifat digital dan moral digital. Dengan dikajinya pembahasan ini, peneliti menggabungkan antara moral sosial dengan moral digital.

A. Pengertian Moralitas Sosial

Secara etimologis, moralitas sosial berasal dari dua kata yaitu moralitas dan sosial. Moralitas berasal dari bahasa latin *mores*, artinya respon yang terpusat kepada internal (tindakan atau bukan tindakan) dari segala bentuk organisme hidup (individu atau kelompok) kepada dorongan internal atau eksternal. Istilah ini kemudian berkembang menjadi tindakan baik atau buruk yang diterima oleh masyarakat.⁵³ Sedangkan, sosial berasal dari bahasa latin *socius*, yang berarti teman, rekan atau sekutu, arti ini merujuk pada hubungan atau interaksi antara individu dalam masyarakat.⁵⁴ Dengan demikian, moralitas sosial dapat dipahami sebagai

⁵³ Glosbe, "Kamus Latin-Indonesia Kata *mores*," diakses pada 12 November 2024 dari <https://id.glosbe.com/la/id/mores>.

⁵⁴ Glosbe, "Kamus Latin-Indonesia Kata *socius*," diakses pada 12 November 2024 dari <https://id.glosbe.com/la/id/socius>.

prinsip atau norma tentang baik dan buruk yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang terbentuk melalui interaksi dan hubungan antarindividu di dalamnya.

Secara terminologis, moralitas sosial merujuk pada nilai-nilai, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman bersama dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas sosial mengatur bagaimana individu berperilaku satu sama lain dalam konteks sosial dan berkontribusi pada keteraturan serta keharmonisan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan saling menghormati yang dianggap baik dan benar oleh komunitas atau kelompok sosial tertentu.⁵⁵

Moralitas sosial dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai baik atau buruk yang telah diterima secara luas. Moralitas ini berkaitan erat dengan hukum, adat, dan norma sosial yang berlaku, di mana moral seseorang dinilai berdasarkan tindakan yang sesuai atau bertentangan dengan norma tersebut. Moralitas sosial mencakup aspek akhlak, etika, budi pekerti, dan nilai, yang bersama-sama membentuk sikap dan perilaku individu di lingkungan sosial mereka.⁵⁶ Dalam konteks Pendidikan, moral merupakan komponen penting yang harus diintegrasikan dalam pembelajaran, terutama untuk membentuk karakter siswa yang bermoral baik.⁵⁷

Menurut Murtadha Muthahhari seorang ulama sekaligus filsuf modern, menekankan bahwa dasar moral dalam Islam adalah pengenalan kepada Tuhan (*ma'rifatullah*). Moralitas dalam Islam mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, serta menyeimbangkan nilai spiritual dan sosial.⁵⁸

Dalam ajaran Islam, Moralitas sosial sudah menjadi aspek fundamental yang berfungsi untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah, tetapi juga

⁵⁵Agus Abdul Rahman, "Teori Perkembangan Moral dan Model Pendidikan Moral," *Psychopathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 3, no. 1, 2010, hal. 38

⁵⁶Tutuk Ningsih, *Transformasi Moral Digital Dalam Pembelajaran*, Banyumas: SIP Publishing, 2002, Cct. 1, hal. 30

⁵⁷Muhammad Qorib dan Mohammad Zaini, *Integrasi Etika dan Moral Spirit dan Kedudukannya Dalam Islam*, Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2020, Cct. 1, hal. 43

⁵⁸Murtadha Mutahhari, *Filsafat Moral Islam*, Beirut: Muassasah Ummul Quro, 2004, hal. 182

memberikan panduan moral yang jelas untuk hubungan antar sesama manusia.⁵⁹ Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, kepedulian sosial, persaudaraan, dan tanggung jawab yang membentuk fondasi moralitas sosial. Sebagai contoh perlunya bersikap adil terhadap sesama manusia selaras dengan perintah Allah SWT pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak-keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat diatas mengandung perintah Allah kepada umat manusia untuk menegakkan keadilan secara universal tanpa diskriminasi. Ayat ini menegaskan kepada orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan yang sejati dan saksi yang jujur semata-mata karena Allah, bahkan jika keadilan tersebut harus ditegakkan terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Kondisi sosial atau ekonomi seseorang, seperti kekayaan atau kemiskinan, tidak boleh memengaruhi keputusan dalam menegakkan keadilan. Allah memperingatkan agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau kesaksian yang tidak benar. Tindakan memutarbalikkan fakta

⁵⁹Muhammad Qorib dan Mohammad Zaini, *Integrasi Etika dan Moral...*, hal. 156

atau menolak menjadi saksi kebenaran dilarang karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia.

Peneliti mengambil kesimpulan pada penafsiran ayat ini menggarisbawahi pentingnya pengendalian hawa nafsu dalam pengambilan keputusan dan menegakan hukum, sehingga keadilan tetap menjadi landasan yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi. Pendekatan ini menunjukkan keadilan sosial sebagai bagian dari terbentuknya moral sosial yang baik.

Mengenai definisi moral ini, beberapa ilmuwan sosiologi dan tokoh filsuf terkenal dari barat menjabarkan moral kepada beberapa teori sebagai berikut.

1. Teori Kewajiban (Deontologis)

Immanuel Kant (1724–1804 M), Kant berpendapat bahwa moralitas sosial didasarkan pada prinsip kewajiban atau aturan universal. Menurutnya, tindakan dianggap bermoral jika dilakukan berdasarkan kewajiban dan prinsip moral yang dapat berlaku umum, tanpa memperhatikan konsekuensinya. Kant menerapkan konsep moral ini dengan “Imperatif Kategoris” yaitu aturan moral yang harus diikuti oleh semua orang tanpa pengecualian demi kebaikan bersama.⁶⁰

2. Teori Konsekuensi (Utilitarianisme)

John Stuart Mill (1806–1873 M) melalui pendekatan teori Utilitarianisme, Mill memandang moralitas sosial sebagai tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Moralitas sosial menurut Mill berfokus pada hasil akhir atau konsekuensi dari suatu tindakan dalam menciptakan kebahagiaan kolektif.⁶¹

3. Teori Kebajikan (Virtue Ethic)

Aristoteles (384–322 SM), seorang filsuf Yunani kuno Aristoteles menekankan pentingnya kebajikan dalam moralitas sosial. Menurutnya, individu yang bermoral adalah yang memiliki karakter dan kebajikan, seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam

⁶⁰Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, diterjemahkan oleh Robby Habiba Abror, Yogyakarta: Insight Reference, 2022, hal. 54

⁶¹Aisyah Tsabit Effendi, “Etika Utilitarianisme John Stuart Mill Dalam Prespektif Islam”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2021, hal. 38

konteks sosial, moralitas tercapai ketika individu hidup sesuai kebajikan dan bekerja sama demi kebaikan masyarakat. Konsep yang dipakai oleh Aristoteles adalah Etika Nikomachea atau Etika Kebajikan, yaitu fokus pada pembentukan karakter dan kebajikan individu sebagai dasar dari moralitas.⁶²

4. Teori Kontrak Sosial (Social Contract)

Emile Durkheim (1858–1917 M) seorang sosiolog Prancis, Durkheim melihat moralitas sosial sebagai hasil dari kesepakatan kolektif yang berasal dari norma dan nilai-nilai masyarakat. Menurutnya, moralitas merupakan hasil konstruksi sosial yang mengikat individu untuk mematuhi aturan-aturan sosial demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁶³

Berdasarkan pandangan para pemikir terkemuka di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa moralitas sosial memiliki berbagai perspektif yang saling melengkapi. Kant menekankan kewajiban universal sebagai dasar moralitas, sementara Mill fokus pada konsekuensi tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan kolektif. Aristoteles menyoroti pentingnya pembentukan karakter dan kebajikan individu, sedangkan Durkheim melihat moralitas sebagai hasil kesepakatan sosial yang mengatur keteraturan masyarakat. Meskipun pendek--atan mereka berbeda, keempat pemikiran ini menunjukkan bahwa moralitas sosial memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan memahami berbagai konsep ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana moralitas diterapkan dalam konteks modern untuk menjawab tantangan sosial yang kompleks.

B. Definisi dan Karakteristik Dunia Digital

Secara bahasa, istilah digital berasal dari kata “*digital*” yang merujuk pada penggunaan teknologi berbasis angka 0 dan 1 (biner) dalam pengolahan dan penyimpanan data elektronik.⁶⁴ Dengan demikian, secara

⁶²Jepi Melandari, “Etika Nikomachea Dalam Prespektif Aristoteles: Studi Atas Etika Manusia”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hal. 65

⁶³Andi Erlangga dan Firdaus W. Suheb, “Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 7, no. 3, 2023, hal. 34

⁶⁴Rina Oktaviani, “Homo Digitalis: Manusia dan Teknologi di Era Digital”, *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, vol. 13, no. 2, 2023, hal. 43

etimologi, dunia digital menggambarkan suatu masa yang ditandai oleh penggunaan teknologi informasi berbasis digital untuk mendukung berbagai aktivitas manusia.⁶⁵

Secara terminologi, dunia digital mengacu pada masa di mana teknologi digital, khususnya perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet, menjadi elemen dominan dalam kehidupan manusia. Era ini ditandai oleh digitalisasi data, yang memungkinkan informasi disimpan, diproses, dan disebarluaskan secara instan melalui jaringan global. Dalam konteks sosial dan ekonomi, dunia digital merujuk pada transformasi dalam berbagai sektor, termasuk komunikasi, pendidikan, bisnis, dan budaya, yang dipengaruhi oleh adopsi teknologi digital.⁶⁶

Karakteristik utama dunia digital adalah adanya perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan perilaku manusia. Media sosial misalnya, menjadi ruang utama untuk membangun jaringan sosial, menyebarkan informasi, dan membentuk opini publik. Hal ini memengaruhi dinamika sosial secara mendalam, dari pembentukan komunitas virtual hingga munculnya norma-norma baru dalam interaksi daring.⁶⁷

Dari sisi budaya, dunia digital memfasilitasi pertukaran nilai lintas budaya secara besar-besaran. Hal ini bisa menjadi peluang untuk memperkaya pemahaman multikultural, tetapi juga berisiko mengikis identitas budaya lokal. Ketergantungan pada teknologi sering kali membuat masyarakat lebih terfokus pada dunia maya daripada mempertahankan tradisi atau simbol-simbol budaya yang telah ada. Misalnya, budaya daerah yang mengandalkan kearifan lokal sering kali tergeser oleh *trend* global yang disebarluaskan melalui teknologi komunikasi. Tantangan besar lainnya adalah menjaga moralitas sosial dalam ekosistem digital. Kemudahan interaksi di dunia maya sering kali menyebabkan hilangnya kontrol terhadap etika dan norma, seperti dalam kasus ujaran kebencian, penyebaran konten tidak etis, dan eksploitasi data pribadi. Transformasi budaya dan sosial akibat digitalisasi ini

⁶⁵Tutuk Ningsih, *Transformasi Moral Digital...*, hal. 35-36

⁶⁶Rutiana Dwi Wahyuningsih, dkk, "Masyarakat Digital dan Problematika Kesejahteraan...", hal. 164

⁶⁷Tutuk Ningsih, *Transformasi Moral Digital...*, hal. 42

membutuhkan adaptasi nilai dan norma agar dampaknya tetap positif dan tidak merugikan.⁶⁸

Masyarakat digital ini merupakan komunitas sosial yang struktur dasarnya dibangun melalui jaringan mikro-elektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Masyarakat digital terbentuk dari adaptasi serta integrasi teknologi maju ke dalam sistem sosial dan budaya manusia, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup. Kerangka dasar masyarakat digital mencakup interaksi antara manusia dan teknologi, yang dirancang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan perangkat dan infrastruktur digital. Masyarakat digital juga dipandang sebagai koneksi menyeluruh dari semua aspek kehidupan masyarakat melalui proses digitalisasi. Hal ini meliputi penggunaan media digital sebagai sarana interaksi sosial, pengolahan big data, layanan berbasis internet seperti *e-commerce*, serta penerapan kecerdasan buatan di berbagai bidang, termasuk hukum, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat digital sangat bergantung pada tingkat literasi digital individu untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan inklusif.⁶⁹

Di era ini juga, telah banyak menghadapi tantangan dalam ketidaktersediaan sumber daya manusia dan berbagai infrastruktur teknologi informasi. Pembentukan masyarakat digital membutuhkan dana dan anggaran yang memadai dan memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Hal ini sering menjadi kendala karena keterbatasan anggaran belanja publik. Dukungan implementasi kebijakan yang inklusif juga menjadi hambatan besar pengembangan masyarakat digital.⁷⁰

Perkembangan teknologi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Era ini membawa berbagai kemudahan dan inovasi, mulai dari komunikasi global yang instan, transformasi gaya hidup, hingga perubahan dalam pola interaksi sosial melalui media sosial dan perangkat pintar. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, muncul tantangan seperti fenomena *hyper-realistic*,

⁶⁸Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Al-Bayyan*, vol. 24, hal 30

⁶⁹Rutiana Dwi Wahyunengsch, dkk, "Masyarakat Digital dan Problematika Kesejahteraan...", hal. 166

⁷⁰Tutuk Ningsih, *Transformasi Moral Digital...*, hal. 67

ketergantungan teknologi, serta ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan identitas budaya.⁷¹

Teknologi digital tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah kehidupan, tetapi juga membentuk ulang cara manusia berpikir, berperilaku, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah manusia dapat tetap mengendalikan teknologi, atau justru menjadi budaknya? Peneliti menekankan bahwa teknologi seharusnya hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga penting bagi masyarakat untuk kritis dalam menghadapinya.⁷²

C. Pengaruh dan Dampak Teknologi Digital Terhadap Moralitas Sosial

Kemajuan teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kegiatan, pekerjaan, dan hal-hal yang memerlukan tenaga ekstra dan bentuk fisik, sekarang telah di ambil alih oleh teknologi dan menjadi pusat berbagai aktivitas seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library* dan lain-lain. Hal-hal itu mengubah cara bagi setiap individu berinteraksi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi digital memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk kebutuhan bisnis dan organisasi, tetapi juga menimbulkan dilema etis terkait privasi data. Internet telah menjadi sumber informasi tak terbatas yang memengaruhi cara kita belajar, bekerja, dan mencari informasi, meskipun menghadirkan tantangan baru seperti keamanan *cyber* dan perlindungan data pribadi. Hal ini menuntut solusi yang seimbang antara inovasi teknologi dan etika.⁷³

Dengan berkembangnya digitalisasi di kalangan masyarakat tentu membawa perubahan dan pengaruh yang signifikan, terlebih dampak positif dan negatif juga sering kali mendapatkan respon yang serius bagi penggiat platform media sosial.

1. Dampak Positif Teknologi Digital terhadap Moralitas Sosial

⁷¹Rina Oktaviani, "Homo Digitalis: Manusia dan Teknologi di Era Digital...", hal. 45

⁷²Tutuk Ningsih, *Transformasi Moral Digital...*, hal. 78

⁷³Novi Suci Dinarti, dkk, "Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber", *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 1 no. 1, 2024, hal. 9

a. Kemudahan Akses Informasi dan Layanan

Teknologi digital mempermudah kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya platform seperti *e-commerce*, masyarakat dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah, sementara *e-government* memberikan akses cepat ke layanan publik seperti pembayaran pajak atau pengurusan dokumen.⁷⁴ Selain itu, aplikasi pembayaran digital mempermudah transaksi keuangan secara efisien, menciptakan kenyamanan dalam kehidupan modern.

b. Transformasi Komunikasi

Teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memungkinkan interaksi lintas jarak melalui perangkat seperti smartphone dan aplikasi pesan instan. Hal ini sangat bermanfaat, terutama ketika pertemuan fisik terbatas, seperti pada situasi pandemi. Komunikasi jarak jauh kini dapat dilakukan secara real-time, memperkuat hubungan sosial dan profesional meskipun berada di lokasi yang berbeda.⁷⁵

c. Inovasi dalam Bidang Sosial dan Ekonomi

Teknologi digital membuka peluang inovasi dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar, kecerdasan buatan seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT). Teknologi ini juga diterapkan dalam layanan kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan perawatan pasien, pengelolaan kota pintar yang efisien, dan solusi untuk berbagai tantangan sosial. Inovasi ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.⁷⁶

d. Peningkatan Pendidikan dan Literasi Digital

Dengan teknologi digital, akses ke sumber belajar online semakin mudah, memungkinkan masyarakat untuk memperluas pengetahuan mereka kapan saja dan di mana saja. Sistem pembelajaran sekolah yang menggunakan kelas pintar atau *smart class*, juga pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif efektif, terutama di tengah keterbatasan fisik. Selain itu, literasi digital

⁷⁴Rina Oktaviani, "Homo Digitalis: Manusia dan Teknologi di Era Digital...", hal. 46

⁷⁵Tutuk Ningsih, *Transformasi Moral Digital...*, hal. 34

⁷⁶Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya...", hal 29

semakin diperkuat, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi secara bijak dan produktif.⁷⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa teknologi digital dengan segala potensi positifnya, telah memperkuat moralitas sosial melalui peningkatan kualitas hidup, aksesibilitas informasi, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, pemanfaatannya harus bijak untuk memastikan dampaknya tetap optimal dan relevan dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

2. Dampak Negatif Teknologi Digital terhadap Moralitas Sosial

a. Penurunan Interaksi Sosial Tatap Muka

Penggunaan perangkat digital secara berlebihan, seperti smartphone dan tablet, mengurangi frekuensi komunikasi langsung antarindividu. Ketergantungan pada teknologi ini melemahkan kemampuan interpersonal, seperti empati, ekspresi nonverbal, dan rasa kebersamaan, karena masyarakat lebih memilih berkomunikasi melalui media digital dibandingkan bertatap muka.⁷⁸

b. Meningkatnya Individualisme dan Perilaku Antisosial

Teknologi digital, meskipun mendukung konektivitas virtual, sering kali mendorong individu untuk lebih fokus pada diri sendiri. Kebiasaan ini menciptakan kecenderungan individualisme, di mana orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital mereka daripada terlibat dalam aktivitas kelompok.⁷⁹ Akibatnya, rasa kebersamaan dalam komunitas berkurang, dan perilaku antisosial semakin berkembang.

c. Kesenjangan Digital

Akses terhadap teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan ekonomi, geografis, dan literasi digital menciptakan kesenjangan yang signifikan. Masyarakat yang kurang terpapar teknologi digital sering kali

⁷⁷Novi Suci Dinarti, dkk, "Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital...", hal. 10

⁷⁸Ayu Puspita dan Anik Nur Handayani, "Dampak Teknologi Digital terhadap Perilaku Sosial Masyarakat 5.0", *Jurnal Inovasi Teknik dan Edukasi Teknologi*, vol. 2, no. 10, 2022, hal. 447

⁷⁹Ayu Puspita dan Anik Nur Handayani, "Dampak Teknologi...", hal. 447

tertinggal dalam akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi, memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial.⁸⁰

d. Ancaman terhadap Privasi dan Keamanan Data

Dalam dunia digital, data pribadi masyarakat banyak disimpan secara online, meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan serangan *cyber*. Data yang disalahgunakan dapat digunakan untuk pencurian identitas, penipuan, atau eksploitasi, menciptakan ancaman serius terhadap keamanan digital individu dan organisasi.⁸¹

Peneliti menyimpulkan bahwa di samping manfaat yang diberikan, teknologi digital juga membawa tantangan yang memerlukan perhatian serius. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi digital yang baik, membatasi penggunaan teknologi secara bijak, serta meningkatkan regulasi dan keamanan berbasis *cyber-technology*.

D. Urgensi Moral di Dunia Digital

1. Tanggung Jawab dan Kejujuran Digital

Menurut Immanuel Kant dalam Dasar-dasar Metafisika Moral, tanggung jawab moral sosial dan kejujuran didasarkan pada imperatif kategoris, yaitu prinsip bahwa tindakan kita harus sesuai dengan aturan universal yang bisa diterapkan pada semua orang. Tanggung jawab sosial muncul ketika kita mempertimbangkan dampak perbuatan kita terhadap orang lain, bukan hanya kepentingan pribadi. Misalnya, jika semua orang berbohong atau ingkar janji, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, menurut Kant kejujuran dan tanggung jawab sosial telah dianggap sebagai kewajiban moral. Selain itu, Kant menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat semata, sehingga komunikasi yang etis harus menghormati martabat lawan bicara, bukan memanipulasi mereka. Singkatnya, moralitas sosial Kant menuntut

⁸⁰Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat...", hal 27

⁸¹Vida.ID, "Dampak Negatif Teknologi," diakses pada 21 November 2024 dari <https://vida.id/id/blog/dampak-negatif-teknologi>.

kejujuran universal dan tanggung jawab untuk menjaga tatanan masyarakat yang rasional.⁸²

Pada konteks Digital, prinsip-prinsip tanggung jawab digital mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi hingga etika berkomunikasi di media sosial. Pengguna internet harus menyadari bahwa setiap tindakan mereka di dunia maya memiliki konsekuensi, baik secara hukum maupun sosial. Misalnya, menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin (*doxxing*) dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang serius. Selain itu, penggunaan kata-kata kasar atau ujaran kebencian (*hate speech*) dapat memicu konflik dan perundungan di media sosial (*cyberbullying*). Oleh karena itu, setiap individu harus memahami bahwa kebebasan berekspresi di internet juga harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain.⁸³

Peran Kejujuran Digital dalam Membangun Kepercayaan adalah fondasi dari segala interaksi online. Tanpa kejujuran, informasi yang beredar di internet dapat dengan mudah dimanipulasi, menyebabkan penyebaran berita palsu dan disinformasi. Salah satu contoh nyata adalah maraknya *deepfake* konten yang direkayasa menggunakan kecerdasan buatan (*AI*) untuk menipu publik. Praktik semacam ini tidak hanya merusak moral individu tetapi juga mengancam stabilitas sosial. Selain itu, kejujuran digital juga mencakup penghargaan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Plagiarisme, atau penjiplakan karya orang lain tanpa izin, adalah masalah serius di dunia akademis. Pengguna internet harus memastikan bahwa mereka menggunakan kreatifitasnya sendiri ketika menggunakan sumber atau sebagai referensi untuk karyanya, baik itu teks, gambar, maupun video. Dengan demikian, kejujuran digital tidak hanya tentang kebenaran informasi tetapi juga tentang keadilan dalam berbagi sumber daya.⁸⁴

⁸²Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, penerjemah Robby Habiba Abror, Yogyakarta: Insight Reference, 2022, hal. 49-56

⁸³Alma Aprilistya, dkk, "Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral dan Etika Generasi Muda," *Journal Indegious Knowledge*, vol. 3, no. 3, 2023, hal. 152.

⁸⁴Kominfo RI, "Panduan Literasi Digital: Kejujuran dan Tanggung Jawab di Ruang Digital", diakses pada 8 Mei 2025 dari <https://www.literasidigital.id>.

Menerapkan tanggung jawab dan kejujuran digital bukanlah hal yang sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya, sebelum membagikan suatu informasi, pengguna dapat memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu melalui situs-situs pengecekan fakta (fact-checking). Selain itu, penting untuk selalu berpikir kritis sebelum mengunggah konten, apakah konten tersebut bermanfaat, akurat, dan tidak merugikan pihak lain. Seperti prinsip THINK (*True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind*) yang dapat menjadi panduan sederhana dalam menjaga moral digital.⁸⁵

Di tingkat yang lebih luas, institusi pendidikan dan pemerintah juga berperan penting dalam mempromosikan literasi digital yang bermoral. Program-program edukasi moral tentang keamanan digital, media sosial dan waspada terhadap berita palsu perlu ditingkatkan serta dijaga dengan baik. Dengan demikian, masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya bertanggung jawab dan jujur dalam setiap aktivitas digital mereka.

2. Keadilan dan Kesetaraan Akses Digital

Konsep keadilan dan kesetaraan sosial merujuk pada prinsip-prinsip etis yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang setara. Menurut John Rawls, keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip *fairness*, di mana setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, serta ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang distribusi sumber daya, tetapi juga tentang pengakuan terhadap martabat setiap individu.⁸⁶

Saat ini, permasalahan atas kesetaraan akses digital telah menjadi kesenjangan sosial yang mengakibatkan masalah serius. Keadilan dan kesetaraan akses digital merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan inklusi sosial di era teknologi. Menurut

⁸⁵J. Smith, & Lee, "Digital Ethics and the Rise of Misinformation: A Global Perspective" *Journal of Cyber Ethics*, vol. 15, no. 3, hal. 54

⁸⁶J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hal. 60.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kesenjangan digital tidak hanya mencakup ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kemampuan individu untuk menggunakannya secara efektif. Masyarakat di daerah terpencil seringkali menghadapi hambatan seperti jaringan internet yang lemah atau biaya perangkat yang mahal, sehingga memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus berfokus pada penyediaan akses yang merata, pelatihan literasi digital, serta subsidi perangkat untuk kelompok rentan.⁸⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* juga menyerukan pentingnya mengurangi kesenjangan digital sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023 PBB mencatat bahwa sekitar 2,85 miliar orang di dunia masih belum memiliki akses internet, yang sebagian besar berasal dari negara berkembang.⁸⁸ Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan.

Di Indonesia, kesetaraan akses digital sendiri masih menjadi tantangan besar. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 12.500 lebih terdapat desa belum terjangkau jaringan internet dan mengalami kendala dalam instalasi BTS⁸⁹ (*Base Transceiver Station*) padahal digitalisasi menjadi kunci pembangunan ekonomi.⁹⁰ Selain itu, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, menyebutkan bahwa hanya 64% populasi yang terhubung ke internet,

⁸⁷Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Bridging the Digital Gender Divide*, Paris: OECD Publishing, 2018, hal. 45

⁸⁸Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), “The Sustainable Development Goals Report 2023” New York, 2023, hal. 56

⁸⁹BTS (*Base Transceiver Station*) berfungsi dalam mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, seperti telepon rumah, telepon seluler, dan gawai pintar. Dengan inilah perangkat pintar atau alat komunikasi yang bergantung kepada sinyal bisa terhubung satu sama lain. T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002, hlm. 210.

⁹⁰Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), “Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik 2022”, Jakarta, 2022 hal. 23

dengan disparitas signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.⁹¹ Dan menurut lapornya pada Januari 2024 kemarin setidaknya terdapat 93,4 juta orang Indonesia yang belum terkoneksi dengan internet, jumlah ini sama dengan 33,5% populasi penduduk Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan program Indonesia Digital Nation yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan keterampilan digital masyarakat.⁹²

3. Moral dalam Etika Komunikasi Digital

Jürgen Habermas, dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*, membedakan antara komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan komunikasi yang bertujuan mempengaruhi orang lain secara instrumental, ia menekankan bahwa komunikasi yang etis harus berlandaskan pada pertimbangan yang rasional atau diskusi yang sistematis dan kondisi ideal untuk mencapai kesepakatan. Menurutnya, suatu tindakan komunikasi dapat disebut etis jika memenuhi prinsip *ideal speech situation*, di mana semua partisipan memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan argumen, tanpa tekanan kekuasaan atau manipulasi, dan bertujuan untuk mencapai konsensus melalui pertukaran argumen yang rasional.⁹³ Habermas menolak komunikasi yang bersifat strategis yaitu komunikasi yang dimanipulasi untuk kepentingan sepihak karena hal itu merusak prinsip kejujuran atau kebenaran (*truth*) dan ketepatan normatif (*rightness*). Dalam konteks modern, etika Habermasian menuntut transparansi dalam debat publik, media yang bebas dari distorsi, serta penghargaan terhadap otonomi setiap individu sebagai subjek rasional yang mampu berpartisipasi dalam diskursus.⁹⁴

Di dunia Digital, etika komunikasi merujuk kepada aktivitas atau interaksi manusia melalui media digital. Menurut Nasrullah,

⁹¹Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Survei Penetrasi Internet di Indonesia 2023”, Jakarta, 2023, hal. 8

⁹²Cindy Mutia Annur, “Teknologi & Telekomunikasi,” diakses pada 9 Mei 2025 dari <https://databoks.katadata.co.id/teknologi&telekomunikasi/statistik/85c14bdf73c0bf/ada-934-juta-orang-indonesia-belum-terkoneksi-internet-peringkat-berapa-di-dunia>.

⁹³Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*, penerjemah Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press, 1981, hal. 26

⁹⁴Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action...*, hal. 100

komunikasi digital menghadirkan tantangan baru karena sifatnya yang cepat, luas jangkauannya, dan seringkali anonym. Oleh karena itu, pengguna perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan agar tidak menimbulkan konflik atau penyebaran informasi palsu.⁹⁵

Salah satu prinsip utama etika komunikasi digital adalah penghormatan terhadap privasi orang lain. Hal ini mencakup tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin atau mengunggah konten yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, melalui etika digital ini, persetujuan sebelum membagikan informasi mengenai orang lain sangatlah penting. Juga, pengguna harus menyadari bahwa setiap unggahan atau komentar dapat berdampak luas, baik positif maupun negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sudiby, literasi digital yang baik akan membantu masyarakat memahami batasan-batasan etis dalam berkomunikasi di dunia maya.⁹⁶

4. Moderasi dalam Konsumsi Digital

Moderasi dalam konsumsi digital merujuk pada pengelolaan waktu dan penggunaan perangkat digital secara seimbang untuk menghindari dampak negatif seperti kecanduan, kelelahan mental, atau penurunan produktivitas. Menurut Przybylski & Weinstein dalam *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi sosial dan kualitas tidur.⁹⁷

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Satrio, penggunaan media digital yang berlebihan, terutama media sosial, dapat menyebabkan adiksi internet dan menurunkan kualitas interaksi tatap muka. Mereka menyarankan agar pengguna membatasi waktu penggunaan gawai dan lebih banyak terlibat dalam aktivitas offline.⁹⁸ Selain itu, studi oleh Puspitasari & Handayani menemukan bahwa literasi digital yang baik membantu masyarakat Indonesia mengelola

⁹⁵Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hal. 87

⁹⁶A. Sudiby, *Etika Komunikasi di Era Digital*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 75.

⁹⁷A. K. Przybylski dan Weinstein, "Digital Screen Time Limits and Young Children's Psychological Well-Being", *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, vol. 60, no. 3, hal. 267

⁹⁸A. Nugroho dan Satrio, "Dampak Media Digital terhadap Interaksi Sosial dan Kesehatan Mental Remaja", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 10, no. 2, hal. 45

konsumsi konten online secara lebih bijak, termasuk mengenali informasi palsu dan mengurangi waktu *screen time* yang tidak produktif.⁹⁹ Dengan demikian, moderasi digital tidak hanya tentang mengurangi durasi penggunaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dan positif dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

5. Sikap Kritis dan Cerdas Terhadap Informasi Digital

Di dunia digital yang dibanjiri informasi, kemampuan untuk berpikir kritis, selektif dan validasi dalam menyerap konten menjadi suatu keharusan. Kecerdasan digital tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga meliputi kemampuan mengevaluasi keakuratan sumber, mengidentifikasi bias, dan menghindari disinformasi. Menurut penelitian Wineburg dan McGrew, individu yang cerdas secara digital mampu membedakan antara sumber yang kredibel dan yang tidak, serta tidak mudah terpengaruh oleh algoritma media sosial yang cenderung memicu echo chamber (sikap difensif terhadap opininya sendiri), serta hanya menerima perspektif dan opini yang sama dengannya.¹⁰⁰

Merujuk dari penelitian yang dilaksanakan oleh Wijayanto dkk, dalam Jurnal Komunikasi Indonesia mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia masih kesulitan membedakan informasi valid dan hoaks. Studi ini menunjukkan 68% responden cenderung membagikan informasi tanpa verifikasi, terutama ketika konten sesuai dengan keyakinan pribadi. Penelitian ini memperkuat urgensi dan pentingnya pendidikan literasi digital di tingkat masyarakat.¹⁰¹

Selain itu, sikap kritis terhadap informasi digital juga melibatkan kesadaran akan motif di balik suatu konten, apakah untuk edukasi, propaganda, atau manipulasi. Seperti ditekankan dalam pedoman UNESCO, literasi media dan informasi harus mencakup

⁹⁹Puspitasari dan Handayani, “Peran Literasi Digital dalam Mencegah Adiksi Internet pada Generasi Z”, *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 15, no. 1, 2022, hal. 32

¹⁰⁰S. Wineburg dan McGrew, “Lateral Reading and the Nature of Expertise in the Digital Age”, *Stanford History Education Group*, 2019, hal. 15

¹⁰¹A. Wijayanto dkk, “Literasi Digital dan Kerentanan terhadap Hoaks di Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 9, no. 2, 2020, hal. 48

pemahaman tentang media *ownership*, konteks politik, serta teknik verifikasi fakta sebelum membagikan informasi.¹⁰²

6. Nilai Spiritual dan Kemanusiaan di Dunia Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa perubahan dalam aspek material, tetapi juga memengaruhi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Menurut Albert Borgmann, teknologi digital dapat menjadi medium untuk pengalaman transendental ketika digunakan untuk memperdalam relasi antarmanusia dan pencarian makna hidup. Platform digital seperti meditasi online atau komunitas spiritual virtual memungkinkan individu untuk terhubung dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan tanpa batas geografis.¹⁰³ Disamping itu, penelitian oleh Suryanto dkk. menunjukkan bagaimana platform digital seperti aplikasi Quran dan meditasi berbasis Islam seperti “Muslim Pro” dan Aplikasi keilmuan lainnya. Media digital juga bisa menjadi gerakan dakwah dan ceramah yang praktis melalui platform media sosial seperti youtube, tiktok, instagram dan lain-lain. Hal membantu masyarakat mempertahankan praktik spiritual di tengah modernitas.¹⁰⁴

Selain itu, teknologi digital juga memperkuat nilai kemanusiaan melalui kolaborasi global dan solidaritas sosial. Sherry Turkle menyatakan bahwa dunia digital menciptakan ruang untuk empati dan dukungan emosional, seperti dalam gerakan amal digital.¹⁰⁵ Hal ini tercermin dalam inisiatif seperti *Kitabisa.com* atau *Ayobantu.com*, yang telah menjadi wadah kepedulian sosial-digital dengan menggalang solidaritas sosial lintas geografi dan agama. Contoh ini menunjukkan bagaimana digitalisasi menjadi instrumen

¹⁰²United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines”, *United Nations*, 2023, hal. 27

¹⁰³Albert Borgmann, *Holding On to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millennium*, Chicago: University of Chicago Press, 1999, hal. 45

¹⁰⁴Suryanto dkk, “Digitalisasi Spiritualitas: Peran Teknologi dalam Pembelajaran Agama Islam di Era Modern”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Kehidupan*, vol. 6, no. 2, 2021, hal. 35.

¹⁰⁵Sherry Turkle, *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*, New York: Penguin Books, 2015, hal. 112

untuk memanifestasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang seringkali terbatas oleh jarak geografis.¹⁰⁶

Namun, integrasi nilai spiritual dan kemanusiaan dalam dunia digital ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dari logika kapitalistik, pengambilan keuntungan bahkan potensi suap menyuap. Yuval Noah Harari memperingatkan risiko dehumanisasi teknologi jika hanya berorientasi profit.¹⁰⁷ Penelitian oleh Hidayat dan Nugroho juga mengkritik komersialisasi konten religi di platform seperti youtube, yang kadang mengorbankan makna spiritual demi algoritma, monetisasi dan *trending* yang menjadikan pelaku egois tanpa memandang perasaan korban konten tersebut, juga menurut sebagian orang hal itu dapat merendahkan orang lain. Sebagai contoh, menjual “rasa kasihan” orang lain demi mendapatkan view, menjadi viral serta meningkatkan *subscriber* dalam platform tersebut.¹⁰⁸ Oleh karena itu, perlu kesadaran kolektif untuk mengarahkan ruang digital pada tujuan mulia seperti keadilan dan kebijaksanaan.

¹⁰⁶Dian Pratiwi, “Filantropi Digital di Indonesia: Studi Kasus Platform Kitabisa.com”, *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 15, no. 1, 2022, hal. 90

¹⁰⁷Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century*, London: Jonathan Cape, 2018, hal. 78

¹⁰⁸Ahmad Hidayat dan Bambang Nugroho, “Komodifikasi Konten Religi di Media Sosial: Analisis Kritis terhadap Praktik Digital Umat Islam Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 10, no. 2, 2020, hal. 114